



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Klaten yang berada di wilayah Kabupaten Klaten.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) Desa di Kabupaten Klaten dengan nama dan kode desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEWENANGAN DESA, PENEKASAN DAN PENETAPAN BATAS DESA

Bagian Kesatu

Kewenangan Desa

Pasal 3

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa meliputi:
- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penekasan dan Penetapan Batas Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penekasan dan penetapan batas desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dan penetapan batas desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Batas masing-masing Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diakui sebagai batas Desa sepanjang belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 30 Maret 2016
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 30 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH :
(4/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Kabupaten Klaten terdiri atas 26 (dua puluh enam) Kecamatan dan 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) Desa. Keberadaan Desa-Desa di Kabupaten Klaten, belum ditetapkan landasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penetapan desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka penetapan desa Pemerintah Daerah harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi desa-desa yang ada di daerah, untuk mendapatkan kode desa;
- b. Hasil inventarisasi menjadi dasar Pemerintah Daerah menetapkan desa dengan Peraturan Daerah; dan
- c. Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah telah menetapkan kode desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, termasuk Desa-Desa di Kabupaten Klaten, sehingga harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Penetapan Desa, sebagai landasan dalam penegasan batas wilayah desa, penetapan kewenangan desa, dan pembentukan organisasi Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Huruf b

Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.

Ayat (2)

Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan Bumi

digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 135

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 4 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENETAPAN DESA

NAMA DAN KODE DESA

NO	KECAMATAN	KODE	NOMOR URUT	NAMA DESA	KODE DESA
1	Prambanan	33.10.01			
			1	Sengon	33.10.01.2001
			2	Cucukan	33.10.01.2002
			3	Kotesan	33.10.01.2003
			4	Pereng	33.10.01.2004
			5	Kebondalem Kidul	33.10.01.2005
			6	Tlogo	33.10.01.2006
			7	Taji	33.10.01.2007
			8	Sanggrahan	33.10.01.2008
			9	Geneng	33.10.01.2009
			10	Kemudo	33.10.01.2010
			11	Bugisan	33.10.01.2011
			12	Kokosan	33.10.01.2012
			13	Kebondalem Lor	33.10.01.2013
			14	Brajan	33.10.01.2014
			15	Randusari	33.10.01.2015
			16	Joho	33.10.01.2016
2.	Gantiwarno	33.10.02			
			1	Gentan	33.10.02.2001
			2	Karangturi	33.10.02.2002

			3	Jogoprayan	33.10.02.2003
			4	Kragilan	33.10.02.2004
			5	Ngandong	33.10.02.2005
			6	Kerten	33.10.02.2006
			7	Katekan	33.10.02.2007
			8	Sawit	33.10.02.2008
			9	Muruh	33.10.02.2009
			10	Mutihan	33.10.02.2010
			11	Baturan	33.10.02.2011
			12	Mlese	33.10.02.2012
			13	Gesikan	33.10.02.2013
			14	Jabung	33.10.02.2014
			15	Towangsan	33.10.02.2015
			16	Ceporan	33.10.02.2016
3	Wedi	33.10.03			
			1	Pesu	33.10.03.2001
			2	Dengkeng	33.10.03.2002
			3	Pacing	33.10.03.2003
			4	Kadilanggon	33.10.03.2004
			5	Kaligayam	33.10.03.2005
			6	Melikan	33.10.03.2006
			7	Jiwowetan	33.10.03.2007
			8	Brangkal	33.10.03.2008
			9	Pasung	33.10.03.2009
			10	Tanjungan	33.10.03.2010
			11	Canan	33.10.03.2011
			12	Kalitengah	33.10.03.2012
			13	Gadungan	33.10.03.2013
			14	Pandes	33.10.03.2014

			15	Birit	33.10.03.2015
			16	Sukorejo	33.10.03.2016
			17	Sembung	33.10.03.2017
			18	Trotok	33.10.03.2018
			19	Kadibolo	33.10.03.2019
4	Bayat	33.10.04			
			1	Ngerangan	33.10.04.2001
			2	Jambakan	33.10.04.2002
			3	Dukuh	33.10.04.2003
			4	Jarum	33.10.04.2004
			5	Nengahan	33.10.04.2005
			6	Bogem	33.10.04.2006
			7	Paseban	33.10.04.2007
			8	Krikilan	33.10.04.2008
			9	Beluk	33.10.04.2009
			10	Banyuripan	33.10.04.2010
			11	Gununggajah	33.10.04.2011
			12	Tegalrejo	33.10.04.2012
			13	Talang	33.10.04.2013
			14	Tawangrejo	33.10.04.2014
			15	Kebon	33.10.04.2015
			16	Jotangan	33.10.04.2016
			17	Krakitan	33.10.04.2017
			18	Wiro	33.10.04.2018
5	Cawas	33.10.05			
			1	Karangasem	33.10.05.2001
			2	Burikan	33.10.05.2002
			3	Nanggulan	33.10.05.2003
			4	Bendungan	33.10.05.2004

			5	Tugu	33.10.05.2005
			6	Kedungampel	33.10.05.2006
			7	Bawak	33.10.05.2007
			8	Barepan	33.10.05.2008
			9	Pakisan	33.10.05.2009
			10	Balak	33.10.05.2010
			11	Cawas	33.10.05.2011
			12	Plosowangi	33.10.05.2012
			13	Baran	33.10.05.2013
			14	Tirtomarto	33.10.05.2014
			15	Japanan	33.10.05.2015
			16	Tlingsing	33.10.05.2016
			17	Mlese	33.10.05.2017
			18	Gombang	33.10.05.2018
			19	Pogung	33.10.05.2019
			20	Bogor	33.10.05.2020
6	Trucuk	33.10.06			
			1	Karangpakel	33.10.06.2001
			2	Wanglu	33.10.06.2002
			3	Trucuk	33.10.06.2003
			4	Kalikebo	33.10.06.2004
			5	Gaden	33.10.06.2005
			6	Planggu	33.10.06.2006
			7	Pundungsari	33.10.06.2007
			8	Sajen	33.10.06.2008
			9	Puluhan	33.10.06.2009
			10	Kradenan	33.10.06.2010
			11	Sabranglor	33.10.06.2011
			12	Jatipuro	33.10.06.2012

			13	Wonosari	33.10.06.2013
			14	Mireng	33.10.06.2014
			15	Bero	33.10.06.2015
			16	Mandong	33.10.06.2016
			17	Sumber	33.10.06.2017
			18	Palar	33.10.06.2018
7	Kebonarum	33.10.07			
			1	Gondang	33.10.07.2001
			2	Basin	33.10.07.2002
			3	Pluneng	33.10.07.2003
			4	Ngrundul	33.10.07.2004
			5	Malangjiwan	33.10.07.2005
			6	Karangduren	33.10.07.2006
			7	Menden	33.10.07.2007
8	Jogonalan	33.10.08			
			1	Pakahan	33.10.08.2001
			2	Ngering	33.10.08.2002
			3	Rejoso	33.10.08.2003
			4	Titang	33.10.08.2004
			5	Somopuro	33.10.08.2005
			6	Tangkisan Pos	33.10.08.2006
			7	Gondangan	33.10.08.2007
			8	Bakung	33.10.08.2008
			9	Sumyang	33.10.08.2009
			10	Karangdukuh	33.10.08.2010
			11	Plawikan	33.10.08.2011
			12	Kraguman	33.10.08.2012
			13	Granting	33.10.08.2013
			14	Prawatan	33.10.08.2014

			15	Wonoboyo	33.10.08.2015
			16	Dompyongan	33.10.08.2016
			17	Joton	33.10.08.2017
			18	Tambakan	33.10.08.2018
9	Manisrenggo	33.10.09			
			1	Nangsri	33.10.09.2001
			2	Barukan	33.10.09.2002
			3	Borangan	33.10.09.2003
			4	Sukorini	33.10.09.2004
			5	Ngemplakseneng	33.10.09.2005
			6	Sapen	33.10.09.2006
			7	Kecemen	33.10.09.2007
			8	Tijayan	33.10.09.2008
			9	Bendan	33.10.09.2009
			10	Tanjungsari	33.10.09.2010
			11	Solodiran	33.10.09.2011
			12	Taskombang	33.10.09.2012
			13	Kranggan	33.10.09.2013
			14	Kebonallas	33.10.09.2014
			15	Leses	33.10.09.2015
			16	Kepurun	33.10.09.2016
10	Karangnongko	33.10.10			
			1	Gumul	33.10.10.2001
			2	Banyuaeng	33.10.10.2002
			3	Kadilajo	33.10.10.2003
			4	Somokaton	33.10.10.2004
			5	Jetis	33.10.10.2005
			6	Karangnongko	33.10.10.2006
			7	Jagalan	33.10.10.2007

			8	Demakijo	33.10.10.2008
			9	Blimbing	33.10.10.2009
			10	Kanoman	33.10.10.2010
			11	Gemampir	33.10.10.2011
			12	Jiwan	33.10.10.2012
			13	Logede	33.10.10.2013
			14	Ngemplak	33.10.10.2014
11	Ceper	33.10.11			
			1	Srebegan	33.10.11.2001
			2	Kajen	33.10.11.2002
			3	Jambukidul	33.10.11.2003
			4	Kujon	33.10.11.2004
			5	Pokak	33.10.11.2005
			6	Pasungan	33.10.11.2006
			7	Mlese	33.10.11.2007
			8	Jombor	33.10.11.2008
			9	Meger	33.10.11.2009
			10	Dlimas	33.10.11.2010
			11	Jambukulon	33.10.11.2011
			12	Ceper	33.10.11.2012
			13	Kurung	33.10.11.2013
			14	Cetan	33.10.11.2014
			15	Tegalrejo	33.10.11.2015
			16	Ngawonggo	33.10.11.2016
			17	Klepu	33.10.11.2017
			18	Kuncen	33.10.11.2018
12	Pedan	33.10.12			
			1	Temuwangi	33.10.12.2001
			2	Beji	33.10.12.2002

			3	Ngaren	33.10.12.2003
			4	Jatimulyo	33.10.12.2004
			5	Jetiswetan	33.10.12.2005
			6	Keden	33.10.12.2006
			7	Bendo	33.10.12.2007
			8	Tambakboyo	33.10.12.2008
			9	Kedungan	33.10.12.2009
			10	Sobayan	33.10.12.2010
			11	Kalangan	33.10.12.2011
			12	Troketon	33.10.12.2012
			13	Kaligawe	33.10.12.2013
			14	Lemahireng	33.10.12.2014
13	Karangdowo	33.10.13			
			1	Tulas	33.10.13.2001
			2	Bulusan	33.10.13.2002
			3	Ringinputih	33.10.13.2003
			4	Soka	33.10.13.2004
			5	Tumpukan	33.10.13.2005
			6	Karangjoho	33.10.13.2006
			7	Demangan	33.10.13.2007
			8	Tambak	33.10.13.2008
			9	Karangdowo	33.10.13.2009
			10	Munggung	33.10.13.2010
			11	Sentono	33.10.13.2011
			12	Pugeran	33.10.13.2012
			13	Ngolodono	33.10.13.2013
			14	Karangwungu	33.10.13.2014
			15	Karangtalun	33.10.13.2015
			16	Babadan	33.10.13.2016

			17	Tegalampel	33.10.13.2017
			18	Bakungan	33.10.13.2018
			19	Kupang	33.10.13.2019
14	Juwiring	33.10.14			
			1	Trasan	33.10.14.2001
			2	Sawahan	33.10.14.2002
			3	Juwiran	33.10.14.2003
			4	Jetis	33.10.14.2004
			5	Ketitang	33.10.14.2005
			6	Gondangsari	33.10.14.2006
			7	Serenan	33.10.14.2007
			8	Tlogorandu	33.10.14.2008
			9	Bolopleret	33.10.14.2009
			10	Tanjung	33.10.14.2010
			11	Kenaiban	33.10.14.2011
			12	Bulurejo	33.10.14.2012
			13	Jaten	33.10.14.2013
			14	Mrisen	33.10.14.2014
			15	Pundungan	33.10.14.2015
			16	Juwiring	33.10.14.2016
			17	Kwarasan	33.10.14.2017
			18	Carikan	33.10.14.2018
			19	Taji	33.10.14.2019
15	Wonosari	33.10.15			
			1	Sidowarno	33.10.15.2001
			2	Bener	33.10.15.2002
			3	Gunting	33.10.15.2003
			4	Kingkang	33.10.15.2004
			5	Jelobo	33.10.15.2005

			6	Lumbungkerep	33.10.15.2006
			7	Ngreden	33.10.15.2007
			8	Bulan	33.10.15.2008
			9	Boto	33.10.15.2009
			10	Wadunggetas	33.10.15.2010
			11	Tegalgondo	33.10.15.2011
			12	Bolali	33.10.15.2012
			13	Sukorejo	33.10.15.2013
			14	Sekaran	33.10.15.2014
			15	Bentangan	33.10.15.2015
			16	Duwet	33.10.15.2016
			17	Pandanan	33.10.15.2017
			18	Teloyo	33.10.15.2018
16	Delanggu	33.10.16			
			1	Dukuh	33.10.16.2001
			2	Jetis	33.10.16.2002
			3	Butuhan	33.10.16.2003
			4	Banaran	33.10.16.2004
			5	Bowan	33.10.16.2005
			6	Sribit	33.10.16.2006
			7	Mendak	33.10.16.2007
			8	Krecek	33.10.16.2008
			9	Karang	33.10.16.2009
			10	Sabrang	33.10.16.2010
			11	Tlobong	33.10.16.2011
			12	Gatak	33.10.16.2012
			13	Delanggu	33.10.16.2013
			14	Kepanjen	33.10.16.2014
			15	Segaran	33.10.16.2015

			16	Sidomulyo	33.10.16.2016
17	Polanharjo	33.10.17			
			1	Glagahwangi	33.10.17.2001
			2	Kapungan	33.10.17.2002
			3	Kahuman	33.10.17.2003
			4	Ngaran	33.10.17.2004
			5	Borongan	33.10.17.2005
			6	Nganjat	33.10.17.2006
			7	Jimus	33.10.17.2007
			8	Turus	33.10.17.2008
			9	Polan	33.10.17.2009
			10	Karanglo	33.10.17.2010
			11	Ponggok	33.10.17.2011
			12	Wangen	33.10.17.2012
			13	Keprabon	33.10.17.2013
			14	Kranggan	33.10.17.2014
			15	Kebonharjo	33.10.17.2015
			16	Janti	33.10.17.2016
			17	Sidowayah	33.10.17.2017
			18	Sidoharjo	33.10.17.2018
18	Karanganom	33.10.18			
			1	Jambeyan	33.10.18.2001
			2	Jungkare	33.10.18.2002
			3	Kadirejo	33.10.18.2003
			4	Tarubasan	33.10.18.2004
			5	Troso	33.10.18.2005
			6	Blanceran	33.10.18.2006
			7	Kunden	33.10.18.2007
			8	Brangkal	33.10.18.2008

			9	Beku	33.10.18.2009
			10	Karangan	33.10.18.2010
			11	Karanganom	33.10.18.2011
			12	Padas	33.10.18.2012
			13	Soropaten	33.10.18.2013
			14	Jurangjero	33.10.18.2014
			15	Ngabeyan	33.10.18.2015
			16	Gledeg	33.10.18.2016
			17	Gempol	33.10.18.2017
			18	Pondok	33.10.18.2018
			19	Jeblog	33.10.18.2019
19	Tulung	33.10.19			
			1	Mundu	33.10.19.2001
			2	Sedayu	33.10.19.2002
			3	Pomah	33.10.19.2003
			4	Bono	33.10.19.2004
			5	Kiringan	33.10.19.2005
			6	Majegan	33.10.19.2006
			7	Dalangan	33.10.19.2007
			8	Gedongjetis	33.10.19.2008
			9	Sorogaten	33.10.19.2009
			10	Beji	33.10.19.2010
			11	Kemiri	33.10.19.2011
			12	Sudimoro	33.10.19.2012
			13	Tulung	33.10.19.2013
			14	Malangan	33.10.19.2014
			15	Pucangmiliran	33.10.19.2015
			16	Cokro	33.10.19.2016
			17	Daleman	33.10.19.2017

			18	Wunut	33.10.19.2018
20	Jatinom	33.10.20			
			1	Beteng	33.10.20.2001
			2	Randulanang	33.10.20.2002
			3	Mranggen	33.10.20.2003
			4	Jemawan	33.10.20.2004
			5	Gedaren	33.10.20.2005
			6	Cawan	33.10.20.2006
			7	Tibayan	33.10.20.2007
			8	Bengking	33.10.20.2008
			9	Temuireng	33.10.20.2009
			10	Bandungan	33.10.20.2010
			11	Kayumas	33.10.20.2011
			12	Socokangsi	33.10.20.2012
			13	Glagah	33.10.20.2013
			14	Krajan	33.10.20.2014
			15	Bonyokan	33.10.20.2016
			16	Pandean	33.10.20.2017
			17	Puluhan	33.10.20.2018
21	Kemalang	33.10.21			
			1	Bawukan	33.10.21.2001
			2	Talun	33.10.21.2002
			3	Panggung	33.10.21.2003
			4	Balerante	33.10.21.2004
			5	Sidorejo	33.10.21.2005
			6	Tegalmulyo	33.10.21.2006
			7	Tlogowatu	33.10.21.2007
			8	Tangkil	33.10.21.2008
			9	Bumiharjo	33.10.21.2009

			10	Kendalsari	33.10.21.2010
			11	Dompol	33.10.21.2011
			12	Kemalang	33.10.21.2012
			13	Keputran	33.10.21.2013
22	Ngawen	33.10.22			
			1	Manjung	33.10.22.2001
			2	Gatak	33.10.22.2002
			3	Duwet	33.10.22.2003
			4	Senden	33.10.22.2004
			5	Ngawen	33.10.22.2005
			6	Kahuman	33.10.22.2006
			7	Pepe	33.10.22.2007
			8	Manjungan	33.10.22.2008
			9	Kwaren	33.10.22.2009
			10	Mayungan	33.10.22.2010
			11	Tempursari	33.10.22.2011
			12	Candirejo	33.10.22.2012
			13	Drono	33.10.22.2013
23	Kalikotes	33.10.23			
			1	Jimbung	33.10.23.2001
			2	Ngemplak	33.10.23.2002
			3	Kalikotes	33.10.23.2003
			4	Krajan	33.10.23.2004
			5	Tambongwetan	33.10.23.2005
			6	Jogosetran	33.10.23.2006
			7	Gemblegan	33.10.23.2007
24	Klaten Utara	33.10.24			
			1	Sekarsuli	33.10.24.2001
			2	Karanganom	33.10.24.2003

			3	Ketandan	33.10.24.2004
			4	Belangwetan	33.10.24.2005
			5	Jonggrangan	33.10.24.2006
			6	Jebugan	33.10.24.2008
25	Klaten Tengah	33.10.25			
			1	Semangkak	33.10.25.2005
			2	Jomboran	33.10.25.2007
			3	Gumulan	33.10.25.2009
26	Klaten Selatan	33.10.26			
			1	Kajoran	33.10.26.2001
			2	Glodogan	33.10.26.2002
			3	Ngalas	33.10.26.2003
			4	Danguran	33.10.26.2004
			5	Trunuh	33.10.26.2005
			6	Sumberejo	33.10.26.2006
			7	Merbung	33.10.26.2007
			8	Tegalyoso	33.10.26.2008
			9	Karanglo	33.10.26.2010
			10	Nglinggi	33.10.26.2011
			11	Jetis	33.10.26.2012

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI HARTINI